

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2013-2019

¹Nia Mari'atus S*, ²Teguh Hadi Priyono, ³Duwi Yunitasari

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Jl. Kalimantan Tegalboto No. 37 Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawa Timur

¹niasholika99@gmail.com, ²teguh_hadipriyo@yahoo.com, ³duwiyunita.feb@unej.ac.id

Corresponding author: ¹niasholika99@gmail.com

Abstrak

Salah satu indikator pengukuran keberhasilan suatu pembangunan ekonomi suatu negara adalah tingkat kemiskinan dimana apabila semakin rendah tingkat kemiskinannya maka tingkat kesejahteraan penduduknya juga akan meningkat. Namun pada kenyataannya, data tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta masih menjadi peringkat pertama di pulau Jawa dari tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa data time series (deret waktu) dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dan cross section (deret lintang) sebanyak 5 kabupaten/kota dengan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan DI. Yogyakarta.

Kata Kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, pengeluaran pemerintah

Abstract

One of indicator to measure the success of a country's economic development is the level of poverty which is there is a decrease in poverty level it will increase the country's welfare. But in fact, the data shows that the pooriness level of DI Yogyakarta still in the first rank between other countries in Java island since 2013. Therefore, the aims of this study was to analyze the effect of economic growth, inflation, a minimum wage, and government expenditure against poverty in DI Yogyakarta. This study is quantitative research methods using secondary data in the form of time series data from 2013 to 2019 and cross section of 5 district/cities and analyzed by panel data regression analysis. The result showed that the economic growth and a minimum wage has a negative and significant effect on poverty. Moreover, inflation have significantly positive effect to poverty. On the other hand, the government expenditure experienced insignificant positive effect on poverty.

Keywords: poverty, economic growth, inflation, minimum wage, government expenditure

PENDAHULUAN

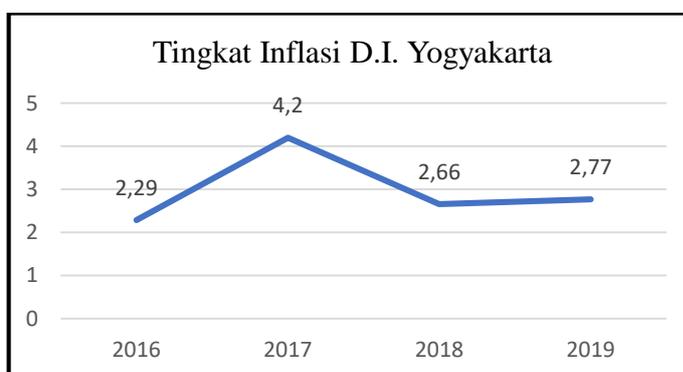
Suatu pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di suatu negara yang salah satunya indikator keberhasilannya diukur dengan tingkat kemiskinan. Suatu pembangunan ekonomi perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap negara untuk memenuhi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya (Puspita, 2020). Oleh sebab itu suatu pembangunan ekonomi mempunyai peranan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu negara (Todaro, 2006). Menurut Abdullah (2008) permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan multidimensional mendorong berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan secara komprehensif yang dilakukan secara terpadu dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia (Budiantara, Diana, Purnadi, Darmesto, 2011).

Untuk terus meningkatkan serta mengembangkan perekonomian daerah, pemerintah telah melakukan upaya pada berbagai aspek untuk mengentaskan atau mengurangi tingkat kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari segi banyaknya program yang dijalankan pemerintah (Ma'arif, Yunitasari, & Wilantari, 2020). Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (2011), upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan berbagai program seperti program keluarga harapan yang disalurkan melalui badan otonomi daerah, bantuan operasional sekolah, program jaminan kesehatan masyarakat, program bantuan beras untuk keluarga miskin, dan juga bantuan program untuk siswa miskin. Selain itu terdapat banyak variabel makro ekonomi yang dapat menyebabkan meningkatnya atau menurunnya suatu kemiskinan yang ada pada suatu daerah diantaranya seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum regional, maupun pengangguran. Kondisi di mana pendapatan individu atau kelompok masyarakat di suatu daerah tidak memenuhi standar pengeluaran minimum yang digunakan untuk dapat hidup secara layak di suatu daerah tersebut, maka kecenderungan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk dari suatu kemiskinan.

Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinannya masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional yakni berada pada tingkat 11% pada tahun 2016-2017 namun pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan menjadi 10% sedangkan kemiskinan nasional berada pada tingkat 7% pada tahun 2017 dan turun menjadi 6% pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu secara berurutan 3%, 6%, 6%, dan 9%, tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta masih lebih tinggi. Selain itu daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinannya di Pulau Jawa sejak tahun 2013 yakni 13%. Penduduk miskin tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase tingkat kemiskinan DI Yogyakarta mengalami fluktuasi pada tahun 2015 dan 2017 meskipun kenaikannya tidak signifikan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan nilai bersih dari setiap barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap kegiatan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Sasana, 2006). Hal ini sejalan dengan penelitian Alisha dan Yulhendri (2021) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap

kemiskinan yang mana hal ini berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi turut mengurangi masalah kemiskinan suatu daerah. Tingginya tingkat inflasi dapat melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap sektor produksi dalam negeri yang selanjutnya dapat mengurangi sektor kepercayaan masyarakat akan nilai mata uang nasional (Khalwaty, 2000). Diketahui bahwa DI Yogyakarta mengalami peningkatan inflasi pada tahun 2017 yakni sebesar 1,91.



Gambar 1. Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta
Sumber: Bappeda DIY (2020)

Berbagai kebijakan sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan telah dilakukan pemerintah seperti kebijakan penerapan upah minimum, dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang mana secara tidak langsung akan turut membantu para tenaga kerja keluar dari lingkaran kemiskinan. Tujuan penetapan upah adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan dan kesejahteraan sehingga semakin tinggi tingkat upah maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Kauffman, 1999). Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta (2019) tingkat upah minimum tiap kabupaten di provinsi DI Yogyakarta terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Upah kabupaten tertinggi yaitu kabupaten atau kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.848.400 pada tahun 2019 dan Rp. 2.004.000 pada tahun 2020, sedangkan kabupaten kota lainnya di provinsi DI Yogyakarta upah minimalnya berada di antara Rp. 1.700.000 dan Rp. 1.800.000, kecuali kabupaten Sleman sebesar Rp. 1.846.000 pada tahun 2020. Kenaikan tingkat upah tersebut dinilai wajar mengingat Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya (Sari & Mangkuwinata, 2017).

Selain itu salah satu alat intervensi pemerintah yang dianggap paling efektif terhadap perekonomian adalah pengeluaran pemerintah yang mana meliputi belanja langsung maupun tidak langsung di mana untuk membangun suatu daerah maka diperlukan pembiayaan pemerintah maupun sektor swasta. Dalam penelitian yang dilakukan Amalia, Madris dan Razak (2015), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah yang berupa program kesejahteraan dan program kerja menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah pada investasi di bidang infrastruktur, pertanian, maupun kesehatan. Namun secara garis besar kedua perbedaan tersebut berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Amalia et.al, 2015). Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pemerintah hendaknya mengalokasikan porsi belanja daerah untuk tujuan positif (Setyowati & Suparwati, 2012). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019) bahwa anggaran belanja daerah Provinsi DI Yogyakarta (2019) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 dan

2014 yakni sebesar 2.509.643.374 dan 3.330.069.350 dalam juta rupiah. pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 3.806.092.624.463,02 dan 3.973.817.207.029,60 dalam juta rupiah. Belanja provinsi daerah terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 menjadi sebesar 5.978.131.574.404,65 (triliun rupiah).

Berbagai program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan baik secara nasional maupun melalui otonomi daerah. Meskipun tingkat Pendapatan Domestik Bruto DI Yogyakarta mengalami kenaikan namun tingkat kemiskinan DI Yogyakarta masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Perkembangan kemiskinan yang terkonsentrasi di suatu daerah dapat menimbulkan masalah yang kompleks yang mana masalah kemiskinan tersebut memiliki hubungan erat dengan variabel makroekonomi regional seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana variabel pengaruh makroekonomi regional terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta. Variabel makro ekonomi yang digunakan yaitu tingkat PDRB provinsi DI Yogyakarta, tingkat inflasi daerah, upah minimum regional, dan pengeluaran pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan data yang dianalisis adalah data tahun 2013 – 2019. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya model penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dan informasi tambahan bagi para pengambilan kebijakan.

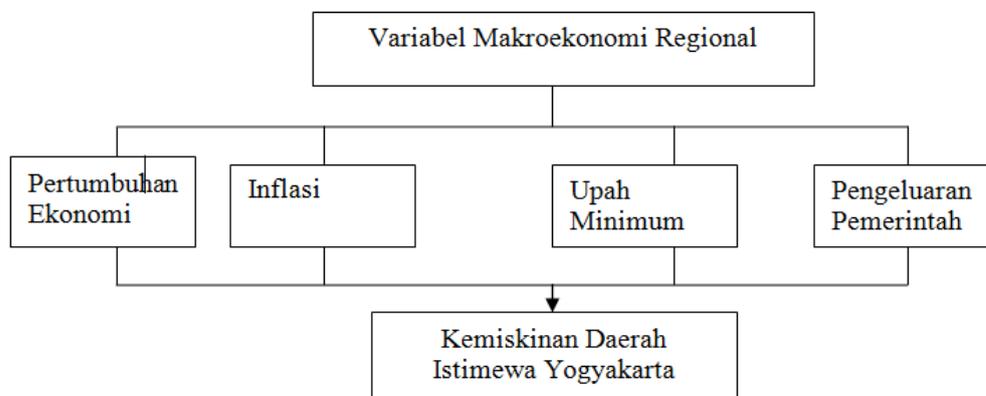
KERANGKA TEORI

Menurut Khomsan et al. (2015), kemiskinan adalah keadaan di mana pendapatan suatu komunitas berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan tolok ukur tingkat pendapatan yang harus dapat dipenuhi oleh setiap individu guna mencapai standar hidup yang baik. Adanya suatu kemiskinan disebabkan oleh banyak hal, di antaranya perbedaan tingkat upah neto, pertumbuhan output, inflasi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan besaran pajak yang berlaku (Kuncoro, 2004). Tidak hanya hal yang berkaitan dengan sosial ekonomi, namun kemiskinan juga terjadi dikarenakan kondisi wilayah dan keadaan politik di masing-masing daerah. Menurut Kurniawan (2017), penyebab kemiskinan pada aspek lain ialah jumlah jam kerja, anggota rumah tangga, transportasi, kepemilikan tanah, sumber air bersih dan jumlah tahun bersekolah. Selain itu tingkat pendapatan riil yang lemah dapat menyebabkan rendahnya produktivitas dan kapasitas modal untuk investasi sehingga masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan (Fanezya, Yunitasari, Komariah, 2019).

Penelitian ini menganalisis kemiskinan dengan variabel makroekonomi regional yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum kabupaten, dan pengeluaran pemerintah atau belanja daerah dalam kerangka pikir penelitian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan seberapa jauh suatu aktivitas ekonomi memberikan nilai tambah bagi masyarakat pada periode tertentu yang mana tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi tersebut dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah jika kenaikan pendapatan tersebut menyebar pada setiap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Datt dan Ravallion (1992) menemukan bahwa pada provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi pada periode yang cukup lama akan memiliki angka kemiskinan yang tinggi karena migrasi masuk dari provinsi lainnya akan menyumbangkan angka kemiskinan tersebut. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan salah satunya tercermin dalam penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009) yang menemukan bahwa adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat

kemiskinan. Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu Raharjo (2011) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengukur sejauh mana kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian daerah tersebut. Hubungan ini mengindikasikan bahwa pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan sehingga tercapainya tingkat kesejahteraan. Di sisi lain pendapatan yang relatif rendah dan tetap dapat menyebabkan adanya inflasi yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup layak sejalan dengan Powers (1995) yang mengungkapkan adanya hubungan positif yang signifikan antara inflasi dengan kemiskinan jika di ukur dengan skala konsumsi. Hal ini di dukung dengan penelitian Blank dan Powers (1993) yang menyatakan adanya hubungan signifikan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Faktor upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah secara tidak langsung dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan dimana upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan penetapan upah adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti kesehatan dan kesejahteraan sehingga semakin tinggi tingkat upah maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Kaufman, 1999) hal ini sebelumnya telah turut dijelaskan Mankiw (2006) bahwa penetapan nilai upah minimum merupakan harga terendah yang harus dibayarkan. Selain itu kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran belanjanya juga turut serta memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan suatu daerah sehingga dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat hendaknya pemerintah mengalokasikan porsi belanja daerah untuk tujuan yang positif (Setyowati & Suparwati, 2012). Penyebab-penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran kemiskinan oleh Nurkse (1953).

Variabel-variabel makroekonomi tersebut berperan sebagai variabel independen (variabel bebas) dan bersama dengan kemiskinan sebagai variabel dependennya (variabel terikat) yang akan di ukur menggunakan alat analisis regresi data panel untuk memperoleh tingkat signifikansi. Salah satu penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian Jefferson dan Kim (2012) yang menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan kinerja variabel makroekonomi di Amerika Serikat pada rentang waktu 1986-2011. Penelitian Sari dan Mangkuwinata (2017) menyatakan bahwa inflasi dan upah minimum regional berpengaruh positif terhadap kemiskinan sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Adapun skema kerangka pemikiran penelitian ini diuraikan pada Gambar 2. berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menganalisis mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan DI Yogyakarta. Metode analisis menggunakan analisis data panel yaitu data sekunder dalam bentuk *time series* yaitu dari tahun 2013-2019 dan *cross section* yaitu 5 kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bappeda DIY Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa), i = data *cross section* Provinsi DI Yogyakarta (6 Kabupaten/Kota), t = data *time series* Provinsi DI Yogyakarta (2013 – 2019)

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto (Persen)

X_2 = Inflasi (Persen)

X_3 = Upah Minimum (Rupiah)

X_4 = Pengeluaran pemerintah daerah (Rupiah), β_0 = Konstanta

Sebelum melakukan pengujian model, maka dilakukan pemilihan model terbaik melalui uji Chow, uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow ini digunakan untuk mengetahui apakah *fixed effect model* (FEM) lebih baik dari model *common effect model* (CEM). Uji ini menguji signifikansi intersep α_1 apakah berbeda-beda pada setiap sektor atau justru tidak berbeda (Falah, Mustafid & Sudarno, 2016). Uji Hausman akan memberikan penilaian menggunakan *chi-square statistic*. Apabila uji Hausman ditolak maka berarti penolakan terhadap *random effect model* (REM). Dengan prosedur pengujian sebagai berikut: (1) Pembuatan hipotesis uji Hausman : $H_0 = \text{REM}$ dan $H_1 = \text{FEM}$; (2) Penentuan kriteria uji. Apabila *chi-square* hitung lebih kecil dari *chi-square* tabel dan probabilitas hitung $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak sehingga metode FEM lebih tepat digunakan. Apabila *chi-square* hitung lebih besar dari *chi-square* tabel dan probabilitas hitung $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis diterima dan model REM lebih tepat digunakan. Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih model yang lebih baik diantara FEM dan CEM dengan melakukan uji REM yang berdasarkan nilai residual ϵ_{it} dari REM. Setelah dilakukan pengujian model terbaik, maka dilakukan uji statistik. Uji statistik dilakukan untuk memastikan model penelitian tidak diragukan lagi (Gujarati, 2012).

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen. Dalam uji F apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel – variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

$$F = \frac{R^2(k - 2)}{(1 - R^2)(n - k + 1)}$$

Dimana R^2 = Koefisien determinasi
k = Jumlah variabel
n = Jumlah observasi

Kriteria Pengujian: (1) Apabila F hitung < F tabel dan apabila probabilitas F hitung < 0,05 maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen yang dijelaskan secara signifikan; (2) Apabila F hitung > F tabel dan apabila probabilitas F hitung > 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama signifikan memengaruhi variabel dependen.

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap konstan variabel lain. Dengan rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Dimana β_i = Koefisien regresi

$Se(\beta_i)$ = Standar error koefisien regresi

Kriteria Pengujian yaitu apabila t hitung > t tabel, dan apabila probabilitas maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen secara signifikan atau jika nilai probabilitas t-statistik kurang dari alfa sebesar 0,05 atau 5% maka variabel dependen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R^2) berkisar antara nol dan satu. Apabila nilai (R^2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilainya mendekati satu maka menunjukkan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan pengujian model maka penelitian ini harus memenuhi syarat-syarat asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Jarque-Berra LM dengan normalitas antara variabel bebas dan variabel terikat harus terpenuhi dengan keabsahan dengan dilakukannya uji t dan uji F, apabila normalitas tidak terpenuhi maka data tidak terdistribusi normal dan tidak dapat dilakukan uji statistik. Pengujian multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan hubungan linier di antara variabel bebas dalam model regresi. Apabila variabel-variabel bebas berkorelasi secara sempurna, maka metode kuadrat terkecil tidak bisa digunakan. Uji multikolinieritas menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya (Gujarati, 2012). Uji heteroskedastisitas harus dipenuhi agar taksin dalam model penelitian regresi bersifat BLUE sehingga semua residual *error* mempunyai varian yang sama. Nilai heteroskedastisitas dilihat dari nilai probabilitas masing-masing variabel yaitu apabila nilai p *value* lebih besar dari alfa (5%) maka persamaan tersebut bebas dari heteroskedastisitas dan begitupun sebaliknya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara *error term* dengan variabel dalam penelitian melalui nilai Durbin-Watson yang dibandingkan dengan nilai pada dU dan dL. Apabila nilai Durbin-Watson berada selain diantara dU dan 4-dU artinya terjadi autokorelasi dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Kemiskinan

Semakin berkembangnya zaman, definisi kemiskinan telah mengalami perluasan dan semakin kompleksnya faktor – faktor penyebab kemiskinan, serta permasalahan lain yang dapat melingkupi kemiskinan suatu daerah. Menurut UU No 13 Tahun 2013 untuk melaksanakan tanggung jawab negara dan mengurangi tingkat kemiskinan diperlukan adanya suatu kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kemiskinan kini tidak lagi hanya meliputi dimensi ekonomi, tetapi telah meluas hingga ke dimensi sosial.

Tingkat kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Selain itu kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta selalu menempati peringkat pertama di Pulau Jawa dari tahun 2013. Jumlah penduduk miskin provinsi DI Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun 2013 – 2019.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan kenaikan *output* yang diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun dalam jangka panjang. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah. Namun suatu pertumbuhan ekonomi yang baik pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan dan menyerap tenaga kerja dengan optimal. Pertumbuhan ekonomi provinsi DI Yogyakarta berbeda tiap daerah, pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sleman dari tahun 2013 hingga tahun 2016, namun pada tahun 2017-2019 Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu 13,49% pada tahun 2019. Hasil tersebut diikuti dengan Kota Yogyakarta sebesar 5,96% pada tahun 2019.

Upah Minimum

Menurut UU No. 13 Tahun 2004, upah merupakan hak buruh atau pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada buruh atau pekerja yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Penetapan upah minimum yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu upaya menangani kemiskinan berdasarkan standar hidup layak dengan mempertimbangkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi sesuai yang tertera pada pasal 88(4). Tingkat upah minimum tiap kabupaten di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kabupaten/kota dengan tingkat upah tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.065.247 pada tahun 2013 dan Rp. 1.848.400. Pada tahun 2019 diposisi kedua yaitu Kabupaten Sleman sebesar Rp. 1.701.000 hal ini tidak jauh berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya.

Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus sepanjang waktu. Menurut Badan Pusat Statistik, kenaikan satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali apabila kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan kenaikan pada barang lainnya.

Meningkatnya inflasi suatu daerah dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya kemiskinan suatu daerah. Tingkat inflasi yang terjadi di provinsi DI Yogyakarta mengalami fluktuasi pada tahun 2013-2017 dan menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Inflasi tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 8,11%, namun mengalami penurunan yang signifikan yaitu tahun 2019 menjadi 2,54%. Tidak jauh berbeda dengan kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,53% pada tahun 2013 yang mana persentase tersebut merupakan tingkat inflasi terendah pada tahun 2013.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan penggunaan sumber daya ekonomi secara tidak langsung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan pengeluaran pemerintah melalui program-program yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi yang dianggap paling efisien yang mana pengeluaran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah dilakukan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pengeluaran pemerintah di provinsi D.I Yogyakarta meningkat setiap tahunnya pada setiap kabupaten/kota. Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan APBD tertinggi dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.800.885.085.871,00 diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar Rp. 2.271.327.162.263,85. Kabupaten dengan APBD terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar Rp. 1.594.621.302.805,35.

Model penelitian ini menggunakan variabel kemiskinan (jumlah penduduk miskin) menjadi variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah baik belanja langsung maupun tidak langsung. Uji untuk mengetahui model yang paling sesuai yaitu melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Apabila sudah diperoleh model terbaik, langkah selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi-asumsi klasik.

Uji Chow

Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji Chow yang dilakukan untuk membandingkan hasil estimasi model antara CEM dan FEM dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai *cross section* F sebesar 1275.986312 dengan probabilitas 0.000 dan signifikan pada $\alpha \leq 5\%$. Pengambilan keputusan yang akan digunakan adalah menggunakan metode FEM hal ini dikarenakan probabilitas *cross section* signifikan yaitu $\leq 5\%$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah FEM maka tahap berikutnya dilakukan uji Hausman untuk mengetahui apakah FEM merupakan model terbaik dibandingkan dengan model REM.

Uji Hausman

Uji ini dilakukan untuk menentukan manakah model terbaik diantara FEM dan REM. Dalam pengujian ini diketahui bahwa *cross section random* sebesar 5103.945229 dengan probabilitas sebesar 0.000 yang mana jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka metode terbaik yang harus dipilih adalah FEM daripada REM. Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa metode terbaik yang dapat digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel penelitian yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan adalah FEM. Pemilihan model ini dikarenakan model ini memiliki standard

error yang lebih kecil dibandingkan model lainnya. Selain itu probabilitas masing-masing variabel independen pada model FEM lebih signifikan dibandingkan CEM dan REM, maka model uji LM tidak perlu dilakukan.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini semua asumsi klasik terpenuhi yang terdiri dari uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Nilai probabilitas masing – masing variabel lebih dari 5% yaitu 0,2509, 0,0826, 0,6584, dan 0,4566 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Pada uji multikolinieritas seluruh variabel independen pada penelitian memiliki nilai kurang dari 0.8 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian bebas dari gejala multikolinearitas. Pada penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi hasil ini ditunjukkan oleh hasil autokorelasi sebesar 2.173228 dimana nilai tersebut berada di tengah-tengah antara dU dan 4-dU sehingga tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji normalitas pada penelitian ini juga diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque-Berra sebesar 0,086645 yang mana lebih besar dari pada alpha (5%) oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa residual terdistribusi normal. Ketika semua asumsi klasik dipenuhi maka dilakukan pengujian model estimasi.

Berdasarkan hasil estimasi sesuai Tabel 1, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan} = 16.22610 - 0.077992\text{PE} + 0.043596\text{INF} - 0.343385\text{UM} + 4.56\text{E-}14\text{PP}$$

Tabel 1. Hasil Estimasi

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	16.22610	19.95250	0.0000
PE	-0.077992	-2.278835	0.0311
INF	0.043596	2.150635	0.0410
UM	-0.343385	-5.487316	0.0000
PP	4.56E-14	1.036082	0.3097
<i>R-squared</i>		0.996793	
<i>Adjusted R-squared</i>		0.995806	
<i>F-Statistic</i>		1010.050	
Prob (<i>F-Statistic</i>)		0.000000	
t-tabel		1.68957	

Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah terdapat pengaruh bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang sesuai menggunakan FEM, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 1010.050 dengan probabilitas 0.000000 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,61 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$. Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama memengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta.

Uji t

Berdasarkan hasil estimasi terlihat bahwa t-hitung dari variabel pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -2.278835 dengan probabilitas 0.0311 signifikan pada $\alpha = 5\%$ sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Variabel inflasi memiliki t=hitung sebesar 2.150635 dan probabilitas sebesar

0.0410 yang berarti bahwa inflasi memiliki berpengaruh terhadap kemiskinan. Variabel upah minimum -5.487316 dengan tingkat *p value* 0.00000 signifikan pada $\alpha = 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan. Selain itu variabel pengeluaran pemerintah memiliki *t*-hitung sebesar 1.036082 dengan *p value* 0.3097 atau lebih besar dari α yang mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Koefisien determinasi (R^2)

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2013-2019 dengan pendekatan FEM memperoleh nilai R^2 sebesar 0.996793. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 99% dan sisanya dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan Kuznet yang mana menyatakan bahwa kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada masyarakat, kemampuan ini tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi penyesuaian kelembagaan dan juga ideologis yang diperlukan, atau dengan arti kata lain pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara yang mana merupakan syarat dari penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009) yang menemukan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Variabel inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di mana hal ini sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa inflasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara inflasi dengan kemiskinan (Powers, 1995). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Prastyo (2010) yang mana menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Penelitian ini meneliti variasi tingkat kemiskinan di 5 kabupaten/kota yang ada di provinsi DI Yogyakarta.

Variabel tingkat upah minimum yang diterapkan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan hasil ini sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam periode waktu 2013-2019. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hapsoro dan Yeti (2013), Yanti dan Marhaeni (2015) yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu perkembangan pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum patut dipertimbangkan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum yaitu dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 (Kaufman, 2000).

Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta atau dengan kata lain pengeluaran pemerintah yang diukur menggunakan belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis/dugaan penelitian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di

Provinsi D.I Yogyakarta. Pernyataan tersebut bertolak-belakang dengan teori yang dikemukakan Rostow (1959), yaitu pengeluaran pemerintah memegang peran penting dalam pembangunan suatu daerah yang berkaitan langsung dengan usaha pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramdany (2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor diantaranya seperti pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan dan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan belum efektif dan diperlukan waktu yang lebih panjang dalam penyerapannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada teori-teori dan pembuktian secara empiris maupun ekonomi terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan pada tahun 2013-2019, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, hal ini terjadi karena kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi. Variabel inflasi memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan setiap kenaikan inflasi akan memengaruhi harga-harga secara umum. Variabel pengeluaran pemerintah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan yang mana hasil ini tidak sesuai dengan teori, karena penyerapan pengeluaran pemerintah pada setiap provinsi dilakukan dengan upaya yang berbeda-beda dalam segi pengalokasian dana dan efektivitas waktu.

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan seperti Pemerintah melalui BUMN dapat meningkatkan kerja sama dengan swasta dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi sebagai penggerak perekonomian yang mana dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah maupun nasional, melakukan koordinasi antara pemerintah dan otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia yang dalam hal ini sebagai otoritas moneter sangat diperlukan untuk mengatasi masalah inflasi dengan menetapkan kebijakan yang tepat seperti pembatasan kredit, *cash ratio*, kebijakan diskonto, dan pasar terbuka. Selain itu pemerintah dapat mengambil langkah dengan menekan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, mengendalikan harga, kebijakan upah, dan menaikkan *output* hasil produksi. Di samping itu pemerintah disarankan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam penetapan upah minimum yang mana akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dalam rangka upaya pengalokasian pengeluaran pemerintah hal yang perlu diperhatikan adalah perlu adanya perencanaan yang matang sehingga pengalokasian dana tepat sasaran dan perlu adanya evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sehingga pemerintah dapat mendapat gambaran terkait pengelolaan keuangan daerah pada tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. N. (2008). *Analisis kebijakan publik dalam penanggulangan masalah kemiskinan*. Jakarta: Sinar.
- Alisha, W. & Yulhendri. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 4(4), 581-593.

- Amalia, R., Madris, & Razak, A.R. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Analisis*, 4(2), 183–89.
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (2020). *Inflasi*. Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta. (2019). *Upah Minimum Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Kemiskinan di Indonesia*. Statistika Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Presentasi Kemiskinan Wilayah di Indonesia*. Statistika Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Ringkasan APBD Yogyakarta*. Yogyakarta
- Budiantara, I. N., Diana, R., Purnadi, & Darmesto, S. (2011). Relationship pattern of poverty and unemployment in Indonesia with Bayesian Spline approach. *Ijbas-Ijens*, 2(11), 121-133.
- Datt, G., & Ravallion, M. (1992). Growth and redistribution components of changes in poverty measures: A decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s. *Journal of Development Economics*, 38(2), 275–95.
- Falah, B. Z, Mustafid, & Sudarno. (2016). Model regresi data panel simultan dengan variabel indeks harga yang diterima dan yang diberikan petani. *Jurnal Gaussian*, 5(4), 611-621. doi:10.14710/j.gauss.v5i4.14718.
- Fanezya, N.A., Yunitasari, D., & Komariyah, S. (2019). *Analisis ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Undergraduate' thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Gujarati, D. N., & Porter, D.C. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (Buku 2 Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Khalwaty, T. (2000). *Inflasi dan solusinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hapsoro, D.N., & Yeti, G. (2013). Analisis pengaruh variabel makroekonomi regional terhadap tingkat kemiskinan perkotaan. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), 56-68.
- Haryanto, T.P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148–58.
- Jefferson, P.N., & Kim, K. (2012). *Macroeconomic fluctuation and poverty*. Health Care Management Papers. The Oxford Handbook of the Economics of Poverty, Oxford University Press.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2011). *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Retrieved from: <https://pustaka.pu.go.id/biblio/program-penanggulangan-kemiskinan-kabinet-indonesia-bersatu-ii/E3JJG>.
- Kauffman, B. E, & Hotchkiss, J.L. (1999). *The Economics of labour markets*. Canada: South Western.
- Khomsan, A., Dharmawan, A.H., Saharuddin, Alfiasari, Sukandar, D., & Syarief, H. (2015). *Indikator kemiskinan dan misklarifikasi orang miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawan, M. (2017). Analisis faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupten Musi Banyuasin (Studi kasus di Kecamatan Sungai Lilin). *Jurnal Ilmu Ekonomi Global Masa Kini*, 8(1), 16-20.

- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan pembangunan daerah, reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Ma'arif, S., Yunitasari, D., & Wilantari, R.N. (2020). Analisis spesialisasi dan konsentrasi spasial industri manufaktur di Provinsi Jawa Timur. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(1), 26-38.
- Mankiw, G. (2006). *Pengantar ekonomi makro* (Edisi Ketiga). Jakarta: Salemba Empat.
- Nurkse, R. (1953). *Problem of capital formation in underdeveloped countries*. New York: Oxford University Press.
- Prastyo, A. A. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan (Studi kasus pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2003-2007)* (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Puspita, M. N. (2020). *Analisis konvergensi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2018* (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi Bisnis, UPN Veteran Yogyakarta.
- Powers, E. T. (1995). Inflation, unemployment, and poverty revisited. *Federal Reserve Bank of Cleveland, Economic Review*, 31(3), 2-13. Retrieved from: <https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/publications/discontinued-publications/economic-review/1995-economic-review/er-1995q3-inflation-unemployment-and-poverty-revisited.aspx#:~:text=Most%20of%20the%20research%20that,inflation%20has%20very%20little%20effect>.
- Raharjo, A. (2011). *Manajemen pemerintah daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramdany, M. (2015). Determinan kemiskinan di Indonesia tahun 1982-2012. *Economic Development Analysis Journal*, 4(1), 58-64.
- Rostow, W.W. (1959). The stages of economic growth. *The Economic History Review, New Series*, 12(1), 1-16.
- Sari, J., Mangkuwinata, D.S. (2017). Pengaruh variabel makroekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 94-107.
- Sasana, H. (2006). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan*, 3(2), 146-170.
- Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening (Studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Tengah). *Prestasi*, 9(1), 113-133.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi kesembilan, Jilid I). Jakarta: Erlangga.
- Wongdesmiwati (2009). *Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia: Analisis ekonometrika*. Retrieved from: https://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometri_.pdf
- Yanti, C.I.D.P., & Marhaeni, A.A.I.N. (2015). Pengaruh pendidikan, tingkat upah dan pengangguran terhadap persentase penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Bali. *PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 11(2), 68-75.